

Temuan BPK Meningkatkan 12 Persen

Kabupaten Melawi Berprestasi

PONTIANAK. Hingga semester I Tahun 2011, badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap lima belas entitas yang ada di Kalbar. Hasilnya terdapat 2404 temuan dari 4849 rekomendasi.

"Temuan dan rekomendasi ini mengalami peningkatan 12 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 2144 temuan dari 4313 rekomendasi," kata

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Ir Adi Sudibyo MM usai menyerahkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Kantor perwakilan BPK RI Kalbar, Senin (22/8).

Dia menjelaskan, dari 4849 rekomendasi yang diberikan BPK, sejumlah 2740 atau sebesar 57 persen rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut. Namun, masih ada 16

■ Halaman 7



Bupati Kubu Raya menandatangani Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Kantor perwakilan BPK RI Kalbar, Senin (22/8).
ABDU SYUKRI.

Temuan BPK

.... dari halaman 1

persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari 770 rekomendasi.

Namun, sambung Adi Sudibyo, untuk tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi mengalami peningkatan 10 persen dibandingkan posisi semester dua tahun lalu. Sedangkan untuk tindak lanjut yang telah dilakukan namun belum selesai, terjadi penurunan dari 30 persen semester dua tahun lalu, menjadi 28 persen pada semester satu tahun ini.

"Penurunan yang signifikan, kata dia, terjadi pada jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 7 persen dari 23 persen menjadi 16 persen. "Dari progress ini menunjukkan Pemprov Kalbar telah menunjukkan usaha yang keras untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan telah menghasilkan capaian-capaian yang cukup signifikan," ungkap Adi Sudibyo.

Terhadap hasil TLHP ini sendiri, Adi Sudibyo berharap kepada seluruh Kabupaten/kota untuk tetap menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. "Selain juga untuk

lebih meningkatkan percepatan tindak lanjut perbaikan tata kelola keuangan dengan lebih baik lagi," dia mengingatkan.

Sementara, untuk capaian hasil peringkat TLHP, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai peringkat pertama dengan skor 59, peringkat kedua dengan skor 57 diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas.

Di urutan peringkat ketiga dengan skor 44 diraih Kabupaten Landak, peringkat 4 diraih Kabupaten Bengkayang dengan skor 43.

Kabupaten Sekadau meraih peringkat kelima dengan skor 42. Dilanjutkan dengan peringkat ke enam dengan skor 37 diraih Kabupaten Kayong Utara, peringkat ke tujuh dengan skor 34 diraih Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang.

Peringkat delapan Kabupaten Pontianak dengan skor 33, peringkat Sembilan Kota Pontianak dengan skor 29. Peringkat sepuluh diraih Kabupaten Sanggau dengan skor 27, sementara peringkat sebelas diraih Kabupaten Ketapang dengan skor 22.

Peringkat terakhir, atau peringkat 12 diraih Kabupaten Melawi dengan skor 14.

"Kabupaten Kubu Raya berada di peringkat pertama. Kabupaten Melawi mendapatkan skor terendah dengan nilai 14, sementara Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan peringkat kedua dengan skor 57 dan Kabupaten Sintang peringkat ke tujuh dengan skor 34," terang Adi Sudibyo.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI (TLHP) ini merupakan amanah yang diberikan dan sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, pasal 18 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006.

"Bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI disampaiakan oleh pejabat BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Selanjutnya BPK RI melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan rekomendasi," tuntas jelas Adi Sudibyo. (jul)